

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah masalah bagi negara-negara di dunia terutama pada negara yang sedang berkembang. Bagi Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang yang ada di ASEAN masalah kemiskinan bukan merupakan hal yang baru. Hampir semua periode pemerintahan yang ada di Indonesia menempatkan masalah kemiskinan menjadi isu pembangunan. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan.

Menurut Bappenas (2006) kemiskinan adalah terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi, terbatasnya akses terhadap air bersih, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, lemahnya jaminan rasa aman, lemahnya partisipasi, dan besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga.

Kemiskinan memang persoalan yang kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi. Tetapi, berkaitan pula dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Wijayanti dan Wahono,2005:215).

Menurut BPS, Kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan diukur dari sisi pengeluaran perkapita atau dengan kata lain kemiskinan dipandang dari sisi ketidakmampuan ekonomi. Berdasarkan data BPS tahun 2001-2012 Pemerintah Indonesia telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2001-2012

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2001	37,87	18,41
2002	38,39	18,20
2003	37,34	17,42
2004	36,15	16,66
2005	35,10	15,97
2006	39,30	17,75
2007	37,17	16,58
2008	34,96	15,42
2009	32,53	14,15
2010	31,02	13,33
2011	30,02	12,49
Sep-2012	29,13	11,66

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2013.

Pada tahun 2001 sampai dengan 2005 jumlah penduduk miskin di Indonesia secara bertahap telah mengalami penurunan yaitu pada tahun 2001 sebanyak 37,87 juta jiwa (18,41 persen) pada tahun 2005 menjadi 35,10 juta jiwa (15,97 persen). Upaya pemerintah untuk menurunkan jumlah penduduk miskin telah tercapai pada 2005, namun pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan 4,20 juta jiwa (1,78 persen). Sementara itu pada tahun 2006 sampai dengan September 2012 terjadi penurunan yang signifikan yaitu dari 39,30 juta jiwa (17,75 persen) menjadi 29,13 juta jiwa (11,66 persen) pada periode September 2012.

Peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sangat dibutuhkan, sesuai dengan fungsi pemerintah menurut Dumairy (1996) adalah alokasi, distribusi, stabilitas, dan dinamisatif. Peranan pemerintah tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi jika tujuan pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan ingin terselesaikan. Anggaran yang dikeluarkan untuk pengentasan kemiskinan menjadi stimulus dalam menurunkan angka kemiskinan dan beberapa persoalan pembangunan yang lain.

Peran pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari peranan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pembangunan suatu daerah dalam pelaksanaannya diupayakan untuk berjalan searah dengan apa yang menjadi pembangunan nasional. Pembangunan akan mendorong pertumbuhan ekonomi sedangkan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan melancarkan proses pembangunan. Pembangunan suatu daerah dapat berjalan dengan baik jika kesejahteraan masyarakat meningkat. Otonomi daerah yang efektif akan mendukung pembangunan daerah.

Berhasilnya pembangunan disuatu daerah juga dapat tercermin dalam laju penurunan jumlah penduduk miskin. Provinsi Lampung nampaknya belum begitu berhasil, hal ini dapat dilihat dari masih tingginya jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Lampung yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Periode Maret 2012 dan September 2012

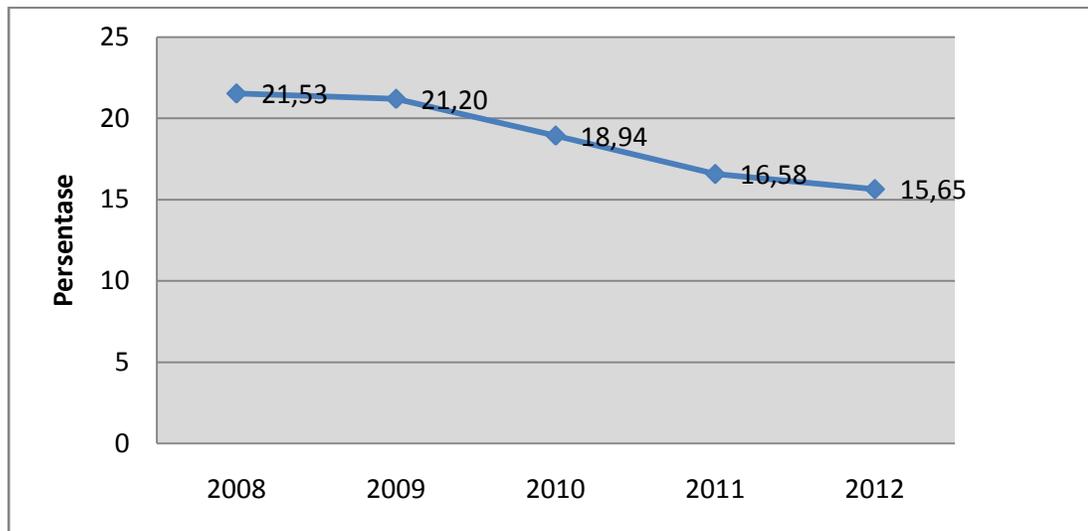
Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (%)		Rata-Rata
	Maret 2012	September 2012	
Aceh	19,46	18,58	19.02
Suamtera Utara	10,67	10,41	10.54
Sumatera Barat	8,19	8,00	8.095
Riau	8,22	8,05	8.135
Jambi	8,42	8,28	8.35
Sumatera Selatan	13,78	13,48	13.63
Bengkulu	17.70	17,51	17.60
Lampung	16,18	15,65	15.91
Bangka Belitung	5,53	5,37	5.45
Kepulauan Riau	7,11	6,83	6.97

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2013.

Berdasarkan data pada Tabel 2. kondisi kemiskinan di Provinsi Lampung tidak jauh berbeda dengan masalah kemiskinan nasional yakni masih tingginya angka kemiskinan. Jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Sumatera, pada tahun 2012 Provinsi Lampung menempati urutan ketiga dengan rata-rata 15,91 persen.

Perkembangan penduduk miskin di Provinsi Lampung dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1. terlihat hasil dari upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung memperlihatkan hasil positif. Pada tahun 2008-2012 persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung terus mengalami penurunan, namun

keberhasilan Provinsi Lampung belum sepenuhnya berhasil karena persentase kemiskinan di Provinsi Lampung masih diatas 10 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2013.

Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2008-2012

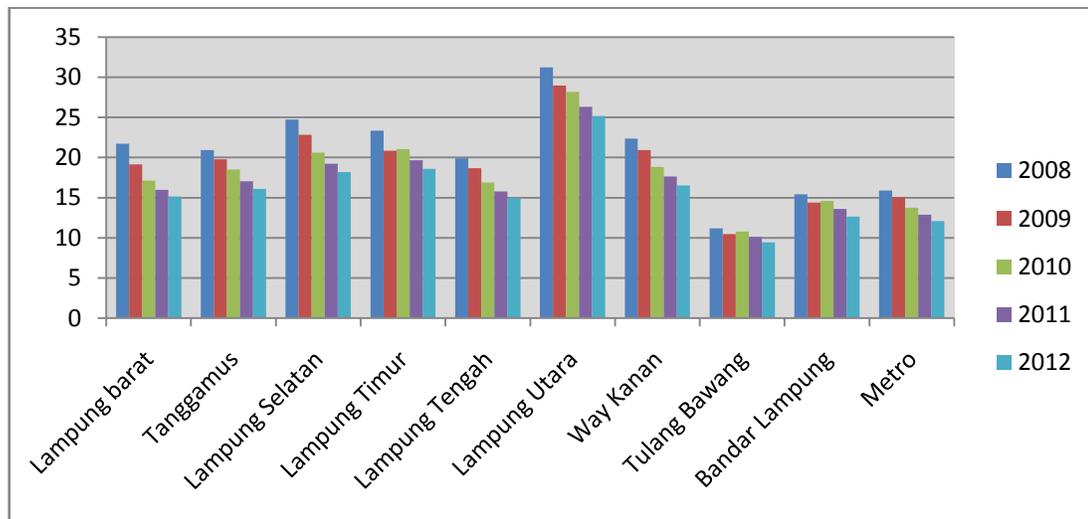
Salah satu cara mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Menurut Schultz, ada lima cara pembangunan sumber daya manusia antara lain : 1). Fasilitas dan pelayanan kesehatan, pada umumnya mempengaruhi harapan hidup kekuatan dan stamina rakyat, tenaga dan vitalitas rakyat. 2). Latihan jabatan, termasuk magang yang diorganisasikan oleh perusahaan. 3). Pendidikan yang diorganisasikan pada tingkat dasar, menengah dan tinggi. 4). Program studi bagi orang dewasa yang tidak diorganisasikan oleh perusahaan, termasuk program ekonomi khususnya pada pertanian. 5). Migrasi perorangan dan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan kesempatan kerja yang selalu berubah (Jhingan, 2012:414).

Tabel 3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
2008	365,6	1.226,0	1.591,6	17,85	22,14	21,53
2009	349,3	1.209,0	1.558,3	16,78	21,49	21,20
2010	301,7	1.178,2	1.479,9	14,30	20,65	18,94
2011	222,7	1.046,4	1.269,1	11,32	18,39	16,58
2012	237,9	981,06	1.219,0	11,88	16,96	15,65

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2013.

Jika dilihat dari Tabel 3. antara jumlah penduduk miskin di perkotaan dan di pedesaan, ternyata jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih banyak daripada jumlah penduduk miskin di perkotaan. Hal ini dapat disebabkan karena masalah pendapatan yang rendah, kualitas sumber daya yang rendah, serta masalah sosial.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2013.

Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2008-2012

Pada Gambar2. dapat dilihat bahwa dalam periode 2008-2012 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung masih mempunyai tingkat kemiskinan yang tinggi yaitu diatas 10 persen. Kabupaten Lampung Utara merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan Kabupaten Tulang Bawang adalah kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah, sedangkan untuk Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung memiliki tingkat kemiskinaan yang tinggi dibandingkan dengan Kota Metro. Penyebab kemiskinan di Provinsi Lampung yaitu dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, sarana-prasarana infrastruktur yang kurang memadai, dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Pemerintah Provinsi Lampung harus lebih proaktif untuk pengembangan sumber daya manusia agar dapat mengurangi penduduk miskin, yaitu harus memiliki pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, dan ditunjang oleh infrastruktur yang memadai, serta peran pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

Pendidikandan kesehatan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang sama pentingnya dengan investasi dalam modal fisik untuk mencapai kesuksesan ekonomi jangka panjang suatu negara (Mankiw, 2007). Kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan dalam peningkatan kualitas faktor produksi. Kualitas faktor produksi sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kesehatan. Pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan menambah dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kemandirian, dan kepribadian yang merupakan modal dasar yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Angkatan kerja yang terdidik dan terlatih merupakan syarat penting bagi pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan. Semuanya hanya dapat dicapai dengan adanya kesehatan dan pendidikan yang baik.

Kesehatan dan pendidikan membutuhkan campur tangan dari pemerintah karena merupakan penyediaan barang publik. Kebijakan fiskal diyakini merupakan intervensi pemerintah melalui pengeluaran pemerintah untuk pemenuhan pelayanan publik. Pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu: pelayanan kebutuhan dasar (kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok masyarakat) dan pelayanan umum (administratif, barang, dan jasa). Pengeluaran pemerintah dalam pelayanan kebutuhan dasar yang diantaranya untuk pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk investasi terhadap sumber daya manusia karena dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang diharapkan dengan produktivitas yang tinggi maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan meningkat.

Kesejahteraan masyarakat dapat ditentukan oleh tingkat pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujudkan, sehingga apabila tidak bekerja atau menganggur maka akan mengurangi pendapatan dan hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai dan dapat menimbulkan buruknya kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2001). Masalah Pengangguran bisa disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahunnya, sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Hal ini berarti, semakin tinggi jumlah pengangguran maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Selain itu pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang lazim digunakan oleh suatu daerah untuk melihat kemajuan atau kemampuan daerah. Kondisi perekonomian suatu daerah dapat diperoleh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator makroekonomi. PDRB merupakan nilai tambah yang timbul dari seluruh faktor perekonomian disuatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada tingkat regional (Faturrohmin,2011:19)

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing Provinsi mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin(Siregar dan Wahyuniarti, 2007: 27).

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Investasi Sumber Daya Manusia, Pengangguran, dan PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung**”

B. Rumusan Masalah

Menurut data BPS, laju penurunan penduduk miskin di Provinsi Lampung pada periode 2001-2012 sudah relatif baik, namun rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung masih tinggi jika dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera. Pada tahun 2012 tingkat kemiskinan Provinsi Lampung menempati urutan ketiga di Pulau Sumatera. Kemiskinan di Provinsi Lampung lebih banyak di daerah perdesaan dari pada daerah perkotaan.

Kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat menyebabkan tingginya angka kemiskinan. upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dilaksanakan berbagai sektor, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, penduduk umur produktif dan sektor-sektor yang lainnya. Kualitas sumber daya manusia juga akan berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja, kualitas sumber daya yang rendah mengakibatkan banyaknya pengangguran dan pada akhirnya akan meningkatkan angka kemiskinan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang lazim digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan. dimana pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB suatu daerah.

Berdasarkan uraian permasalahan pada penelitian ini, maka dalam penelitian ini dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh investasi sumberdaya manusia terhadap tingkat kemiskinan 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung?

2. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung?
3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh investasi sumber daya manusia terhadap tingkat kemiskinan 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
3. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

Pengentasan penduduk miskin saat ini masih merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang senantiasa menyita perhatian, karena masalah kemiskinan menyangkut berbagai aspek. Walaupun sudah banyak program kemiskinan yang ditujukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun masalah kemiskinan tidak kunjung selesai. Sulitnya penyelesaian masalah ini, disebabkan karena permasalahan yang melibatkan penduduk miskin sangat kompleks. Strategi

pengentasan kemiskinan oleh pemerintah yang efektif mencakup tiga komponen yaitu:

1. Membuat pengeluaran pemerintah bermanfaat bagi rakyat miskin.
2. Membuat pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi rakyat miskin
3. Membuat layanan sosial bermanfaat bagi rakyat miskin.

Studi yang dilakukan Lanjouw, dkk (2001) yaitu dengan menganalisis bagaimana hubungan antara kemiskinan, pendidikan dan kesehatan beserta kaitannya dengan pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik. Penelitian dengan metode statistik deskriptif ini menemukan bahwa penduduk miskin sangat membutuhkan pelayanan/subsidi pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas dan kemerdekaan hidup yang dinamakan manfaat intrinsik. Pendidikan dan kesehatan berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang dinamakan manfaat instrumental. Lanjouw dan kawan-kawan juga hendak membuktikan *report* Bank Dunia tahun 1990 bertajuk “Indonesia: *Strategy for a sustained Reduction in Poverty*” yang menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah hal yang *critical* (sangat mendesak) untuk diberikan kepada penduduk miskin di Indonesia, sehingga sangat dibutuhkan peningkatan investasi dikedua bidang tersebut.

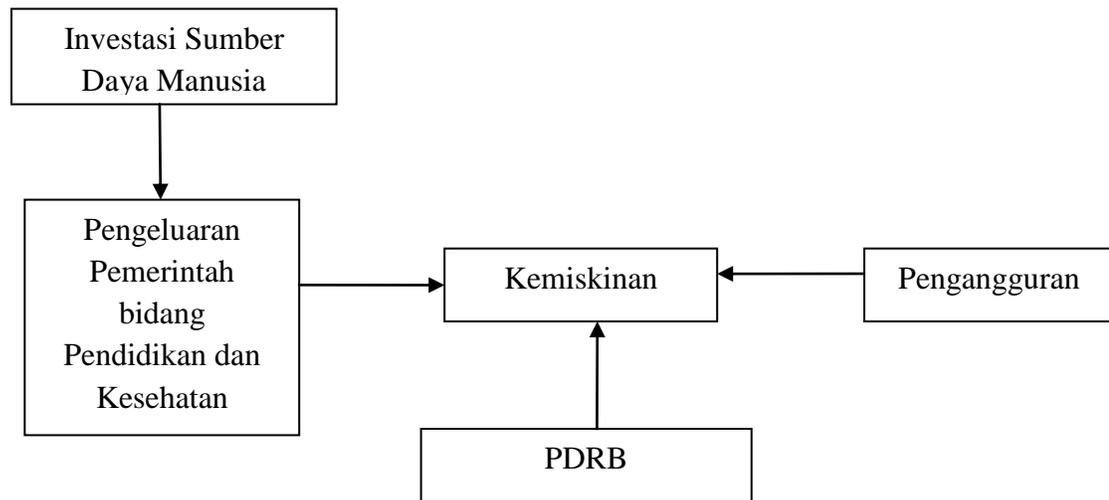
Penelitian lain yang dilakukan Brata (2005) dalam jurnalnya yang berjudul “Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan”. Dari hasil estimasi dengan menggabungkan data tahun 1996,1999,2002 diperoleh bukti bahwa investasi sektor publik untuk bidang sosial membawa manfaat bagi pembangunan manusia dan

kesejahteraan penduduk. Investasi bidang sosial tersebut menghasilkan manfaat dalam peningkatan *Human Development Index* (HDI) dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pembangunan manusia yang berhasil juga ditemukan membawa manfaat pada berkurangnya tingkat kemiskinan.

Kemiskinan dapat juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan atau dapat disebut pengangguran. Penelitian Octaviani (2001) yang berjudul “Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke” mengatakan bahwa jumlah pengangguran eratkaitannya dengan kemiskinan di Indonesia yang penduduknya memilikiketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan.

Dalam suatu proses pertumbuhan ekonomi, salah satu indikator yang digunakan untuk melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi dalam suatu Negara atau wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui proses pertumbuhan ekonomi tersebut, dapat melihat kegiatan ekonomi yang telah dilaksanakan dan dicapai selama periode tertentu Menurut Kuznet (Todaro, 2003), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat

mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.



Gambar 3. Model Kerangka Pemikiran Pengaruh Investasi SumberDayaManusia, Pengangguran, dan PDRB terhadap Kemiskinan

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori-teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yg diperoleh pada pengumpulan data. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga investasi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
2. Diduga pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
3. Diduga PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

- BAB I** : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Tinjauan pustaka mencakup tentang teori-teori yang menjadi landasan atau acuan bagi penelitian ini.
- BAB III** : Metode penelitian yang meliputi jenis dan sumber data, batasan peubah variabel, alat analisis, serta gambaran umum.
- BAB IV** : Hasil perhitungan dan pembahasan, membahas uraian tentang hasil perhitungan serta mengimplikasinya.
- BAB V** : Kesimpulan dan saran yang menyajikan kesimpulan dan saran dari penulis yang didasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN